



EDISI INI:

► HALAMAN 1

Kunjungan Monitoring Bersama Menyoroti Kemajuan Pembelajaran, Gizi, dan Kesejahteraan Anak di Biak

► HALAMAN 2

Mendukung Pemenuhan Hak Anak atas Pola Makan Sehat: Analisis Lanskap Hukum untuk Memperkuat Kebijakan Lingkungan Pangan di Indonesia

► HALAMAN 3

Dari Ko-kreasi Menuju Aksi: Peningkatan Kualitas Gizi di Tingkat Daerah

► HALAMAN 4

#FixMyFood Indonesia: Advokasi Anak Muda untuk Lingkungan Pangan yang Lebih Sehat

► HALAMAN 5

Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Memperkuat Penanganan Wasting pada Anak

Kunjungan Monitoring Bersama Menyoroti Kemajuan Pembelajaran, Gizi, dan Kesejahteraan Anak di Biak



Perwakilan Kedutaan Besar Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), UNICEF, dan Pemerintah melakukan kunjungan ke SD YPK Sorido di Biak Numfor untuk meninjau pelaksanaan kegiatan edukasi gizi, literasi, dan numerasi. ©UNICEF/2026/Ahmad Chair.

Kunjungan Monitoring Bersama (*Joint Monitoring Visit/JMV*) yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Kedutaan Besar Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan UNICEF dilaksanakan pada 17–18 September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kunjungan ini dilakukan dalam kerangka Program Jepang–UNICEF untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Gizi, dan Kesejahteraan Anak di Biak Numfor, sebuah kemitraan dua tahun yang berlangsung dari Februari 2025 hingga Februari 2027.

Para peserta, bersama sekolah, pusat PAUD, orang tua, dan anggota masyarakat setempat, meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi praktik-praktik baik, serta mendiskusikan prioritas untuk keberlanjutan program. Pemantauan mencakup pembelajaran dasar, pendidikan gizi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), rantai pasok pangan lokal, keterlibatan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. JMV tersebut menyoroti kemajuan yang menggembirakan dalam meningkatkan pembelajaran, gizi, dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Beberapa praktik baik yang menjanjikan juga teridentifikasi selama kunjungan. Di TK Hang Tuah, anak-anak mempraktikkan cuci tangan dengan menggunakan sabun, sementara para

guru memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal, sayuran, dan kegiatan berkebun untuk menjadikan proses pembelajaran dan edukasi gizi lebih praktis serta menarik. Di SD YPK Sorido, konsep-konsep gizi diintegrasikan ke dalam pelajaran matematika dan mata pelajaran lainnya, didukung oleh pelatihan guru dan Kelompok Kerja Guru (KKG), serta keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat. Di Dapur Sentral Sehat Wijaya (SPPG), para penjamah makanan yang telah terlatih, fasilitas dapur yang semakin baik, serta praktik higiene yang kuat mendukung penyediaan makanan yang aman bagi 2.379 penerima manfaat di 10 sekolah dan tiga Posyandu.



Anak-anak menyanyikan lagu bertema gizi bersama guru mereka sebagai bagian dari kegiatan pendidikan gizi sebelum menikmati makanan di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor. ©UNICEF, 2026.

Kunjungan ini juga mengidentifikasi sejumlah prioritas tindak lanjut, termasuk peningkatan keterlibatan Puskesmas, perbaikan fasilitas air, sanitasi, dan higiene (WASH) di sekolah, perluasan kapasitas pendidikan inklusif, penguatan sertifikasi dan pemantauan keamanan pangan, serta penyediaan pasokan protein lokal yang andal. Para pemangku kepentingan juga menekankan pentingnya menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal serta memperkuat koordinasi lintas sektor seiring perluasan program MBG di Papua. Kunjungan ini menegaskan kembali pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan berlandaskan kepemilikan lokal dalam mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan bagi anak-anak di Biak Numfor.

Mendukung Pemenuhan Hak Anak atas Pola Makan Sehat: Analisis Lanskap Hukum untuk Memperkuat Kebijakan Lingkungan Pangan di Indonesia

Indonesia menghadapi beban yang semakin meningkat akibat kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit tidak menular (PTM) terkait pola makan. Kondisi ini antara lain didorong oleh lingkungan pangan yang membuat makanan dan minuman tidak sehat mudah diperoleh, terjangkau, dan dipasarkan secara luas. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap lingkungan pangan yang tidak sehat, baik di sekolah, komunitas, maupun ruang digital.

Untuk mendukung respons kebijakan yang berbasis bukti, UNICEF bekerja sama dengan Bappenas melakukan *Legal Landscape Analysis* (LLA) atau Analisis Lanskap Hukum terkait kebijakan lingkungan pangan di Indonesia. Analisis ini mengkaji kesenjangan regulasi dan peluang penguatan kebijakan pada empat bidang utama, yaitu: cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pelabelan gizi di bagian depan kemasan (*Front-of-Pack Nutrition Labelling*/FOPNL), pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak, serta penguatan kebijakan lingkungan pangan sekolah. Studi ini menggabungkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan wawancara dan diskusi kelompok terarah bersama para pembuat kebijakan serta perwakilan pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung kebijakan lingkungan pangan berbasis bukti. Sejumlah regulasi penting, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, memberikan dasar hukum bagi berbagai langkah

kebijakan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencegah obesitas dan PTM. Tantangan utama saat ini adalah menerjemahkan mandat yang sudah ada menjadi tindakan regulasi yang terpadu, terkoordinasi, dan tersusun secara sistematis di berbagai sektor dan institusi.



Narasumber pada Diskusi mengenai Analisis Lanskap Regulasi Kebijakan Lingkungan Pangan di Indonesia, Jakarta. © UNICEF, 2026.

Untuk membahas temuan dan tindak lanjut yang diperlukan, UNICEF memfasilitasi diskusi bersama pemangku kepentingan di Jakarta pada 23 September 2026 yang dihadiri oleh sekitar 60 peserta. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Keuangan, serta Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mendiskusikan rekomendasi dan peluang untuk mempercepat implementasi kebijakan. Salah satu prioritas utama yang diidentifikasi adalah percepatan pengembangan Nutrient Profile Model (NPM) nasional, yang merupakan salah satu rekomendasi utama dalam laporan tersebut, sebagai dasar untuk memperkuat regulasi pelabelan pangan dan pembatasan pemasaran pangan tidak sehat. Atas permintaan Kementerian Kesehatan dan BPOM, UNICEF akan terus memberikan dukungan teknis dalam pengembangan NPM serta penerapannya dalam kebijakan lingkungan pangan.



Peserta pada Diskusi mengenai Analisis Lanskap Regulasi Kebijakan Lingkungan Pangan di Indonesia, Jakarta. © UNICEF, 2026.

Dari Ko-kreasi Menuju Aksi: Peningkatan Kualitas Gizi di Tingkat Daerah

Peningkatan status gizi membutuhkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan kondisi lokal. Sebagai bagian dari dukungan UNICEF kepada Pemerintah Indonesia melalui Child Nutrition Fund (CNF), UNICEF bersama Kementerian Kesehatan menyelenggarakan lokakarya ko-kreasi dengan para pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Medan, Sumatera Utara, pada 26 Agustus 2026 untuk mengidentifikasi langkah-langkah praktis dalam mempercepat perbaikan gizi ibu dan penanganan wasting pada anak.

Lokakarya ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan pemerintah untuk bersama-sama meninjau tantangan utama di bidang gizi, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, serta mengeksplorasi peluang penguatan kolaborasi lintas sektor. Diskusi difokuskan pada penerjemahan prioritas menjadi tindakan konkret yang dapat diintegrasikan ke dalam program, rencana, dan sumber daya pemerintah yang telah ada. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UNICEF yang lebih luas untuk memperkuat kepemilikan pemerintah dan mendukung implementasi prioritas gizi di tingkat daerah melalui CNF. Pendekatan ko-kreasi memungkinkan para pemangku kepentingan lokal merancang solusi yang sesuai dengan konteks masing-masing daerah sekaligus mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran yang dapat direplikasi di provinsi lain.

Sebagai tindak lanjut, UNICEF dan Kementerian Kesehatan akan melakukan kunjungan penjajakan bersama ke Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa



Tenggara Barat (NTB), dan Aceh guna memahami lebih baik prioritas lokal, hambatan implementasi, serta peluang penguatan program gizi ibu dan penanganan wasting anak melalui CNF. Upaya-upaya ini membantu mengubah proses diskusi menjadi aksi nyata dengan menyelaraskan kontribusi para mitra terhadap agenda nasional, memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung solusi praktis yang sesuai konteks guna meningkatkan status gizi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

#FixMyFood Indonesia: Advokasi Anak Muda untuk Lingkungan Pangan yang Lebih Sehat

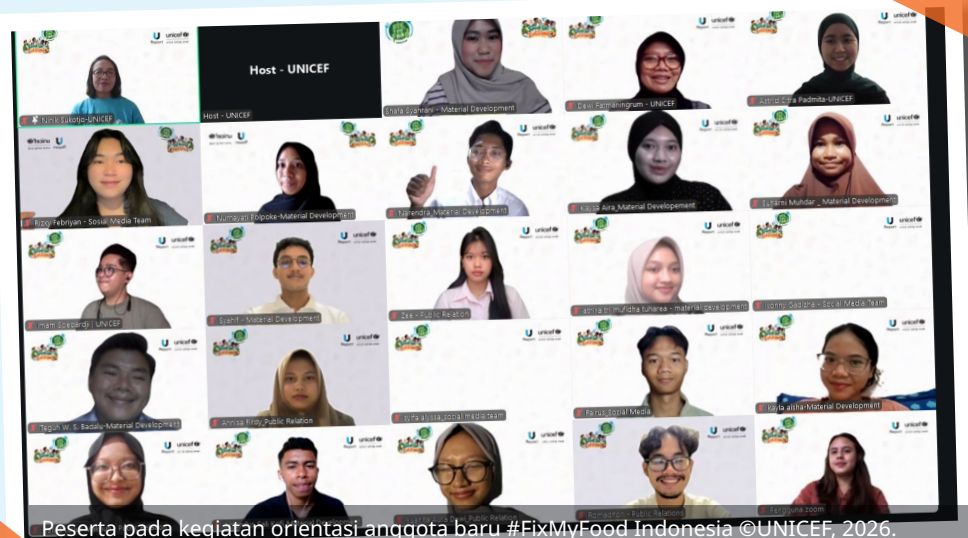
Kelebihan berat badan dan obesitas pada anak merupakan tantangan kesehatan masyarakat global yang terus meningkat. Pada tahun 2025, prevalensi obesitas untuk pertama kalinya melampaui prevalensi kekurangan berat badan pada anak usia sekolah dan remaja secara global. Tren ini salah satunya dipicu oleh lingkungan pangan yang tidak sehat, di mana pangan ultra proses sering kali menjadi pilihan yang paling mudah diperoleh, paling murah, dan paling menarik bagi anak-anak serta keluarga.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, UNICEF meluncurkan Fix My Food (FMF) pada tahun 2023 sebagai gerakan global yang digerakkan oleh kaum muda untuk memperkuat suara generasi muda dan membangun dukungan sosial yang diperlukan guna mendorong kebijakan pangan yang lebih sehat. Saat ini FMF telah berjalan di 18 negara, termasuk Indonesia, dengan memberdayakan kaum muda dari berbagai latar belakang untuk menantang sistem pangan yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, tiga anak muda telah terlibat dalam FMF sebagai anggota Core Research Team dan berkontribusi pada riset partisipatif tahun 2025 yang mendokumentasikan pengalaman nyata kaum muda dalam menghadapi lingkungan pangan yang tidak sehat. Berangkat dari pengalaman tersebut, UNICEF Indonesia memperluas konsep FMF untuk melibatkan lebih banyak anak muda dalam isu pangan sehat dan sistem pangan berkelanjutan. Pada Agustus 2026, FMF Indonesia membuka pendaftaran bagi

anak muda berusia 14–24 tahun yang memiliki minat terhadap pangan sehat, gizi, dan sistem pangan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan memperluas keanggotaan sekaligus memperkaya fokus tematik, termasuk perhatian yang lebih besar pada pangan ultra proses dan makanan pendamping ASI pabrikan (Commercially Produced Complementary Foods/CPCF), pola makan lokal dan tradisional yang berkelanjutan, serta keterkaitan antara perubahan iklim, sistem pangan, dan gizi. Sebanyak 395 anak muda mengajukan pendaftaran. Setelah melalui proses seleksi, 43 peserta dari berbagai provinsi mengikuti sesi orientasi daring pada 20 September 2026 sebagai tahap awal keterlibatan mereka dalam FMF Indonesia. Sesi tersebut memperkenalkan inisiatif FMF dan Program Gizi UNICEF Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai berbagai topik penting, termasuk gizi anak dan ibu, lingkungan pangan sehat, perubahan iklim, dan sistem pangan berkelanjutan.

Sebagai langkah selanjutnya, pada Oktober 2026 UNICEF akan menyelenggarakan pertemuan tatap muka dengan perwakilan peserta terpilih untuk menyusun rencana kerja FMF Indonesia, mengembangkan materi advokasi dan komunikasi awal, serta mengidentifikasi aksi prioritas. UNICEF juga akan terus melibatkan perwakilan FMF untuk memperluas jangkauan materi tersebut dan melibatkan anak muda dalam berbagai diskusi advokasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemangku kepentingan lainnya terkait kebijakan sistem pangan, gizi, dan perubahan iklim.



Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Memperkuat Penanganan Wasting pada Anak

Indonesia terus memperkuat upaya penanggulangan wasting pada anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan bukti implementasi, serta perluasan akses terhadap layanan pengobatan yang berkualitas dan terstandar bagi anak dengan wasting berat.

Pada Juli 2026, Kementerian Kesehatan dan UNICEF melaksanakan pelatihan berjenjang mengenai komunikasi antarpribadi (Interpersonal Communication/ IPC) untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengasuh dalam pemberian Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF). Sebanyak 40 fasilitator tingkat nasional dan daerah dilatih, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan di Nusa Tenggara Timur (NTT) bagi 371 peserta tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Para peserta selanjutnya mendukung peningkatan kapasitas kader Posyandu di wilayah masing-masing.

Pada Juli dan September 2026, dilakukan asesmen dasar (baseline assessment) dan pelatihan Participatory Action Research (PAR) di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan NTT sebagai bagian dari penelitian implementasi mengenai tata laksana rawat jalan untuk wasting berat menggunakan RUTF. Studi ini bertujuan mengidentifikasi tantangan implementasi,

praktik baik, serta menghasilkan solusi praktis untuk penyempurnaan program dan perluasan implementasi di masa depan.

Kapasitas pelayanan juga diperkuat melalui pelatihan Integrated Management of Acute Malnutrition (IMAM) yang berfokus pada tata laksana rawat jalan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan menjangkau 98 tenaga layanan kesehatan dari ketiga provinsi terdampak banjir tersebut. Pelatihan mencakup deteksi dini kasus, diagnosis, tata laksana rawat jalan, penggunaan RUTF, serta pemantauan dan pelaporan. UNICEF juga mendukung pengadaan dan distribusi RUTF ke sekitar 80 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan guna memastikan keberlanjutan layanan pengobatan melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat.

Berbagai upaya terkoordinasi untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, menghasilkan bukti implementasi, memperluas cakupan layanan, dan meningkatkan akses terhadap RUTF tersebut berkontribusi dalam mempercepat pemulihan anak dengan wasting berat sekaligus mendukung upaya yang lebih luas untuk menurunkan stunting dan angka kematian anak.



Penguatan kapasitas tenaga layanan kesehatan, termasuk kader Posyandu di NTT, untuk mendukung penanganan anak dengan gizi buruk melalui konseling yang efektif dan penggunaan RUTF. ©UNICEF, 2026.



Memperkuat kapasitas garda terdepan untuk menyelamatkan lebih banyak anak. Tenaga layanan kesehatan dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berkumpul di Medan untuk memperkuat layanan IMAM pada 19–20 Agustus 2026. ©UNICEF, 2026.

Contact:

Mamadou Ndiaye, Chief of Nutrition
mandiaye@unicef.org

David Colozza, Nutrition Specialist
dcolozza@unicef.org

United Nations Children's Fund

Email: jakarta@unicef.org

Website: www.unicef.org

unicef  **for every child**